

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN WAJO

Misbahuddin*)

Abstract : *The purpose of this study to determine the factors - factors that cause inequality in the district Wajo South Sulawesi province, which so far has always been a measure of success of economic development measured by the rate of economic growth of a region. Methods using survey method with a sample size of 300 people by the criteria of the lowlands, coastal sea. Coastal lakes and urban areas. The analytical method used is the Gini index ratio with the standard of the World bank by category according to criteria Gini ratio imbalance. Data collection method used is survey conducted on four groups of regions (City, Plains / Peranian, Coastal and Coastal lake) by using the technique of cluster sampling and then split three income brackets (Poor, Medium, Dan Rich), with the technique proportionate stratified random sampling. Results research the Gini index calculation sub-districts in urban areas Tempe shows inequality value of 0.67, or it can be said that there is high inequality ($G I > 0.5$) The calculations show that the sub-district agricultural area Maniangpajo, with income from rice farming to the level high inequality but still below inequality in urban areas, it is visible from a Gini index of 0,61. Indeks gini coastal area lakes Tanasitolo subdistrict of 0.67 indicates that this wilyah have a society with high income inequality, while coastal areas are represented by the District have the ball gini index of 0.61 which indicates that this wlayah have income groups with high inequality.*

Keyword: *Gin Index Rasioi and Income Inequality*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Namun pada kenyataannya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai.

Pada skala nasional, tingkat kesejahteraan antar wilayah menjadi tidak berimbang dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi makro, dan sistem pemerintahan yang sentralistik

yang cenderung mengabaikan terjadinya kesetaraan dan keadilan pembangunan antar-wilayah yang cukup besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah yang jauh dari perkotaan (*hinterland*) mengalami eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Secara makro dapat dilihat terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan misalnya antara desa-kota, antara wilayah Indonesia Timur dan wilayah Indonesia Barat, antara wilayah Jawa dan luar Jawa, dan sebagainya (Choirie, 2009:74).

Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagai institusi pelaksana pembangunan di Kabupaten Wajo juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah daerah

melalui serangkaian intervensi kebijakan pembangunan memiliki arti strategis dalam menentukan keberhasilan tujuan pembangunan ekonomi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi ini dapat menunjukkan tingkat perkembangan perekonomian daerah secara makro, agregatif dan sektoral. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi juga merupakan cerminan dari tingkat pendapatan masyarakat yang lebih baik, sedangkan dalam bidang non ekonomi peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan hidup dan aspek lainnya dalam masyarakat. Dengan laju pertumbuhan ekonomi 9,15% di tahun 2014 maka secara makro, pembangunan ekonomi di Kabupaten Wajo dapat dikatakan cukup berhasil dalam menggerakkan roda perekonomian.

Persoalan muncul apabila pertumbuhan ekonomi tersebut dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan social ekonomi masyarakat luas. Dengan mencermati struktur perekonomian Kabupaten Wajo yang didominasi oleh sektor pertanian dalam sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 9,21% dengan share sebesar 30,88% namun dibawah sektor pertambangan dan galian yang laju pertumbuhannya sebesar 15,12% dengan share sebesar 22,24%. Rendahnya laju pertumbuhan sektor pertanian dibandingkan sektor-sektor yang lain maka hal ini dapat menimbulkan perbedaan percepatan pembangunan masing-masing wilayah. Beberapa wilayah khususnya di daerah perkotaan dan dataran rendah dengan dukungan infrastruktur perdagangan dan industri memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan wilayah agraris mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Adanya perbedaan pertumbuhan inilah yang

memicu adanya kesenjangan pendapatan antar masyarakat.

Dengan demikian maka pembangunan yang hanya memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi saja, ternyata menimbulkan masalah yang tidak kecil artinya bagi pembangunan di daerah. Walaupun sasaran ini telah dapat dicapai, namun laju pertumbuhan ekonomi belum mampu menyelesaikan masalah pemerataan hasil-hasil pembangunan seperti kecemburuan sosial, kerawanan disitegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa terdapatnya pola pembagian pendapatan yang lebih merata, pada dasarnya akan lebih menguntungkan golongan penduduk berpendapatan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan rendah karena tidak terjadinya perembesan pembangunan ke golongan masyarakat berpendapatan rendah (efek *trickle down*).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlunya dilakukan kajian tentang : Faktor -Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Wajo.

Maksud

Berdasarkan latar belakang di atas maka pelaksanaan kajian ini merupakan Informasi tentang faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wajo di maksudkan untuk menyediakan informasi mengenai tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah di Kabupaten Wajo.

Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan pendekatan pengeluaran rumah tangga pada daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan dataran pegunungan serta Kabupaten Wajo

secara umum berdasarkan kategori ketimpangan menurut kriteria Gini Rasio.

- b. Memperoleh gambaran tingkat ketimpangan pendapatan masing-masing kecamatan yang didasarkan pada tingkat ketimpangan pendapatan masing-masing wilayah daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan dataran pegunungan.

KAJIAN TEORITIS

Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 1999). Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu; distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro, 2000).

Dari dua definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (dalam Lincoln Arsyad, 1997) Ada 8 Hal Yang Menyebabkan Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*Capital Intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi Negara Sedang Berkembang
8. dalam perdagangan dengan Negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan Negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor Negara Sedang Berkembang.
9. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Pembangunan Dengan Pemerataan

Perubahan ekonomi di samping mengejar laju pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan aspek pemerataan. Ada dua argumen yang berhubungan dengan masalah pembangunan ekonomi dengan pemerataan (Todaro, 2000).

a. Argumen tradisional

Argumen tradisional menfokuskan lebih di dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan yang sangat tidak merata merupakan sesuatu yang terpaksa dikorbankan demi memacu laju pertumbuhan ekonomi secara cepat. Akibat dari pengaruh teori dan kebijakan perekonomian pasar bebas, penerimaan pemikiran seperti itu oleh kalangan ekonom pada umumnya dari negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, baik secara implisit maupun eksplisit menunjukkan bahwa

mereka tidak begitu memperhatikan pentingnya masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Mereka tidak saja menganggap ketidakadilan pendapatan sebagai syarat yang pantas dikorbankan dalam menggapai proses pertumbuhan ekonomi secara maksimum dan bila dalam jangka panjang hal itu dianggap syarat yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk melalui mekanisme persaingan penetasan kebawah (trickle down effect) secara alamiah.

b. Argumen tandingan

Karena terdapat banyak ekonom pembangunan yang merasa bahwa pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara-negara berkembang tidak bisa di nomorduakan, karena hal itu merupakan suatu kondisi penting atau syarat yang harus diadakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000). Dalam argumen tandingan tersebut terdapat lima alasan yaitu;

Pertama, ketimpangan yang begitu besar dan kemiskinan yang begitu luas telah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap perolehan kredit. Berbagai faktor ini secara bersama-sama menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan GNP per kapita dibandingkan jika terdapat pemerataan pendapatan yang lebih besar.

Kedua, berdasarkan observasi sekilas yang ditunjang oleh data-data empiris yang ada kita mengetahui bahwa tidak seperti yang terjadi dalam sejarah pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, orang-orang kaya di negara-negara dunia ketiga tidak dapat diharapkan kemampuan atau kesediaannya untuk menabung dan menanamkan modalnya dalam perekonomian domestik.

Ketiga, rendahnya pendapatan dan taraf hidup kaum miskin yang berwujud berupa kondisi kesehatannya yang buruk, kurang makan dan gizi dan

pendidikannya yang rendah justru akan menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan pada akhirnya mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat, upaya-upaya untuk menaikkan tingkat pendapatan penduduk miskin akan merjanglesang meningkatkannya permintaan terhadap barang-barang produksi dalam negeri seperti bahan makanan dan pakaian.

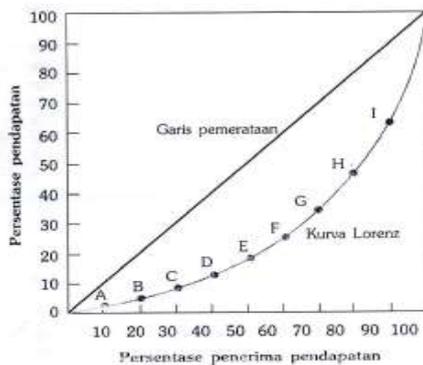
Kelima, dengan tercapainya distribusi pendapatan yang lebih adil melalui upaya-upaya pengurangan kemiskinan masyarakat, maka akan segera tercipta banyak insentif atau rangsangan-rangsangan materiil dan psikologis yang pada gilirannya akan menjadi penghambat kemajuan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi pertumbuhan ekonomi secara cepat dan upaya-upaya pengentasan kemiskinan serta penanggulangan ketimpangan pendapatan bukanlah tujuan-tujuan yang saling bertentangan sehingga yang satu tidak perlu diutamakan dengan mengorbankan yang lain. Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau mengetahui apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, dapat digunakan kategorisasi dalam kurva Lorenz atau menggunakan koefisien Gini.

Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva

Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. (Lincoln Arsyad,1997).

Gambar 1 Kurva Lorenz



Indeks atau Rasio Gini

Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini ratioidikemukakan oleh *C.GINI* yang melihat adanya hubungan antara jumlahpendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan totalpendapatan.Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1.Bila Gini Ratio mendekati nolmenunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

Dinana :

G = Gini Ratio

Pi = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Qi = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Qi-1 = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

k = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan. Namun dalam studi studi empiris terutama dalam *single country*, temyata kemiskinan **tidak identik** dengan kesejahteraan. Artinya ukuran ukuran diatas **belum** mencerminkan tingkat kesejahteraan. Studi yang dilakukan oleh Ranis (1977) dalam Tulus Tambunan (2001) mengemukakan bahwa di Republik Cina dan Ravallion dan Datt (1996) dalam Tulus Tambunan (2001) mengemukakan bahwa di India, menunjukkan kedua negara tersebut dilihat dari tingkat pendapatan per kapita maupun ukuran Gini (*Gini ratio*) menunjukkan tingkat kemiskinan yang cukup parah. Namun dilihat dari tingkat kesejahteraan, kedua negara tersebut masih lebih baik dari beberpa negera Amerika Latin yang mempunyai tingkat *Gini ratio* rendah dan tingkat pendapatan perkapita tinggi.Ranis, Ravallion dan Datt memasukan faktor seperti tingkat kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, hak mendapatkan informasi, layanan kesehatan yang mudah dan murah, perasaan aman baik dalam mendapatkan pendidikan dan lapangan kerja, dan lain lain. Intinya adalah dalam mengukur kemiskinan, banyak variabel non keuangan yang harus diperhatikan.Variabel keuangan (tingkat pendapatan) bukanlah satu satunya variabel yang harus dipakai dalam menghitung kemiskinan.Namun kalau pengambil keputusan, lebih menitikberatkan pada *cross variable study* dalam mengatasi masalah kemiskinan, maka berarti kemiskinan diatasi dengan cara meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang luas.

Index Williamson

Index Williamson yang diperkenalkan oleh Williamson dalam tulisannya tahun

1965 merupakan metode untuk mengukur ketidak merataan regional. Metode ini diperoleh dari perhitungan perkapita dan jumlah penduduk di suatu negara. Secara sistematis perhitungan Indeks Williamson adalah sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB perkapita di Kabupaten/kota i

Y = PDRB perkapita di Provinsi Jawa

Tengah

f_i = Jumlah penduduk di Kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk di Provinsi Jawa

Tengah.

Besarnya Index Williamson ini bernilai positif dan berkisar antara angka nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai index ini (mendekati angka satu) berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Sebaliknya semakin kecil nilai index ini (mendekati angka nol) berarti semakin merata tingkat pemerataan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut.

Oshima menetapkan kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah, apakah ada ketimpangan tinggi, sedang atau rendah. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut (BPS, Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah, 2000).

- Ketimpangan Tinggi jika $IW > 0,5$
- Ketimpangan Sedang jika $IW = 0,35-0,5$
- Ketimpangan Rendah jika $IW < 0,35$.

Namun demikian Index Williamson ini mempunyai kelemahan yakni penghitungan ini baru menggambarkan tingkat pendapatan secara global sejauh mana dan berapa besar bagian yang diterima oleh kelompok yang berpendapatan rendah atau miskin bertambah tidak tampak dengan jelas.

Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan

Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidak merataan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan, terutama di Negara Sedang Berkembang. Melalui pembahasan yang mendalam mengenai masalah ketidakmerataan dan kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut Lincoln Arsyad (1997), cara yang sangat sederhana untuk mendekati masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi. Menurut Todaro (2000), Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk.

Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.

Pendekatan Penyusunan Indikator Pembangunan

Pada dasarnya terdapat tiga pendekatan utama didalam penyusunan indikator pembangunan. *Pertama*, pendekatan input yang dipergunakan seperti anggaran pembangunan, kredit bagi penduduk berpendapatan rendah, jumlah sekolah, jumlah rumah sakit dan sebagainya. *Kedua*, pendekatan output

melalui pendekatan output ini akan lebih diperlihatkan hasil yang dicapai dari usaha-usaha pembangunan tersebut, kenaikan produksi pangan, gizi, penurunan tingkat kematian dan sebagainya. *Ketiga*, pendekatan struktural di dalam pendekatan struktural ini akan lebih diperhatikan perubahan struktur ekonomi, sosial budaya, politik dalam konteks jangka panjang.

Dalam beberapa hal sukar diadakan perbedaan antara pendekatan

output dan pendekatan struktural. Sebaliknya tidak jarang pula indikator input dipergunakan bersamaan dengan indikator output dalam suatu komponen pembangunan. Sehingga dengan demikian klasifikasi ketiga pendekatan penyusunan indikator pembangunan ini lebih bersifat analisis daripada operasional. Komponen-komponen pembangunan yang dapat dipergunakan selaku dasar peninjauan proses pembangunan dapat dikemukakan sebagai berikut :

PENDEKATAN INPUT	PENDEKATAN OUTPUT	PENDEKATAN STRUKTURAL
Anggaran Keuangan Sumbangan Masyarakat Kredit golongan Pendapatan rendah Bantuan Luar Negeri Sarana Aparatur	Pangan Sandang Perumahan Pendidikan Kesehatan Keadilan Administrasi Stabilitas	Pembagian Pendapatan Kesempatan Kerja Kesempatan Berusaha <i>Lingkungan hidup</i> <i>Pertumbuhan Ekonomi</i> Politik <i>Hubungan Internasional</i>

Perangkat komponen pembangunan ini dapat diperluas atau lebih dipersempit. Dalam Kegiatan Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan kajian faktor-faktor penyebab ketimpangan dan indikator Makro Ekonomi Daerah Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Jangka Menengah di Kabupaten Wajo, perhatian akan lebih ditujukan pada komponen pertumbuhan ekonomi dan komponen pembagian pendapatan. Kedua komponen ini dapat dianggap merupakan komponen strategis pembangunan ekonomi daerah. Komponen pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari komponen pembagian pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tanpa terjadi proses pembagian pendapatan atau sebaliknya pembagian pendapatan tanpa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang timpang.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penelitian mandiri dilaksanakan di Kabupaten Wajo, yang

merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan dilaksanakan mulai bulan **Juni 2016** sampai dengan bulan Nopember 2016

Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang penulisan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey yang dilakukan atas empat kelompok wilayah (Kota, Dataran/Peranian, Pesisir Pantai, dan Pesisir Danau) dengan menggunakan teknik *Cluster Sampling*, kemudian membagi tiga golongan pendapatan (Miskin, Menengah, Dan Kaya), dengan teknik *Proportionate stratified random sampling*.

Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, jurnal, karangan ilmiah, koran, majalah, dan internet yang erat hubungannya dengan penelitian dan mendukung pokok permasalahan untuk penyusunan kajian ini. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan

menggunakan kuisioner

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, berupa data primer yang diperoleh dari kuisioner dari obyek sample yang telah dipilih, dan data sekunder yaitu antara lain :

- a. Data tentang penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo selama lima (4) tahun terakhir.
- b. Data jumlah Penduduk menurut kecamatan Kabupaten Wajo 3 tahun terakhir
- c. Data Pembangunan Manusia Kabupaten Wajo dan provinsi Sulawesi Selatan 3 tahun terakhir.

Data tersebut diatas diperoleh dari hasil-hasil survai yang dilakukan oleh Badan Pusat statistik (BPS) dan laporan tahunan dari masing-masing lembaga, dinas, atau instansi terkait.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah Metode Analisis Deskriptif. Untuk tujuan :

1. Menganalisis dengan menggunakan tabulasi silang atas besar pengeluaran

rumah tangga untuk konsumsi makanan

2. Menganalisis dengan menggunakan tabulasi silang besar pengeluaran pengeluaran rumah tangga bukan makanan; seperti perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka barang dan jasa; pakaian, barang tahan lama; pajak dan asuransi; dan kebutuhan pesta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasar atas wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang terstruktur yang disusun dalam bentuk kuisioner diperoleh data yang kemudian disusun dalam bentuk tabulasi

a. Pengeluaran Untuk Makanan

Pengeluaran untuk makanan memperlihatkan besarnya pengeluaran utama atas kebutuhan dasar hidup yang berhubungan dengan kebutuhan gizi, makanan dan minuman penunjang dimana setiap individu membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yang diukur besarnya pengeluaran dalam satu minggu, yang kemudian disimpulkan seperti yang terlihat dalam Tabel 1

Tabel 1 Pengeluaran Rata-Rata Untuk Makanan Menurut Wilayah Dan Golongan Pendapatan Di Kabupaten Wajo

	Miskin	Menengah	Kaya
Kota	126,600	209,600	400,800
Dataran	89,000	214,200	483,800
Pesisir Pantai	115,200	261,600	519,200
Pesisir Danau	106,800	296,200	497,200
Rata-Rata	109,400	245,400	475,250

Data Olah

Terlihat pada Tabel 1 bahwa pengeluaran makanan secara rata-rata untuk makanan bagi kelompok pendapatan miskin, menengah dan kaya pada setiap wilayah menurut

geografisnya terdapat perbedaan yang cukup besar dalam mengkonsumsi makanan dan pengeluaran yang terbesar secara rata-rata untuk kelompok pendapatan kaya adalah makanan

mengandung protein (ikan, daging, telur dan susu). Jika melihat perkelompok pendapatan dalam kelompok wilayah ditemukan bahwa pengeluaran konsumsi makanan tidak memiliki perbedaan yang berarti.

b. Pengeluaran Rumah Tangga Bukan Makanan

b.1 Pengeluaran Perumahan Dan Fasilitas Rumah Tangga

Pengeluaran Perumahan Dan Fasilitas Rumah Tangga memperlihatkan pengeluaran utama dalam rumah tangga

seperti sewa rumah, perbaikan rumah, listrik, air dan telepon, namun pengeluaran yang bersifat rutin seperti listrik, air dan telepon merupakan jenis pengeluaran yang ada pada setiap rumah tangga, sementara pengeluaran untuk sewa dan perbaikan rumah bukanlah pengeluaran rutin, namun tetap menjadi beban dalam rumah tangga. Secara rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Pengeluaran Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga

	Miskin	Menengah	Kaya
Kota	532,800	2,220,400	10,811,200
Dataran	596,800	1,823,600	9,870,400
Pesisir Pantai	588,800	2,181,200	6,618,200
Pesisir Danau	515,200	2,712,400	10,376,600
Rata-Rata	558,400	2,234,400	9,419,100

Data Olahan

Terlihat pada Tabel 2 bahwa pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (Listrik, Air, gas, dan Telepon) merupakan jenis pengeluaran yang memiliki perbedaan cukup besar pada tiga kelompok pendapatan dalam setahun dimana kelompok pendapatan kaya memiliki pengeluaran sekitar 17 kali pengeluaran kelompok miskin. Terlihat juga bahwa pengeluaran kelompok miskin pada keempat wilayah memiliki pengeluaran yang tidak jauh berbeda, demikian halnya dengan kelompok menengah, namun agak berbeda dengan pengeluaran kelompok kaya yang memiliki rentang pengeluaran yang cukup lebar jika dibandingkan dengan pengeluaran kelompok menengah dan miskin.

b.2 Pengeluaran Untuk Aneka Barang Dan Jasa

Pengeluaran untuk aneka barang dan jasa menunjukkan besar konsumsi atas kebutuhan sanitasi (mandi dan

cuci), biaya kesehatan, biaya pendidikan, listrik, air dan gas, transportasi, dan supir dan asisten rumah tangga.

Bedasar dari hasil wawancara memperlihatkan bahwa tidak semua indikator pengeluaran aneka barang dan jasa menjadi beban atas rumah tangga di Kabupaten Wajo, diantaranya adalah pengeluaran untuk supir dan asisten rumah tangga, karena hanya rumah tangga tertentu yang menggunakan jasa asisten rumah tangga dan supir, kemudian biaya kesehatan dimana beberapa obyek penelitian tidak mengikuti program Jamkesmas, sementara yang lain menganggap biaya kesehatan untuk pembayaran BPJS sebagai pungutan atau asuransi.

Untuk melihat besar rata-rata pengeluaran atas aneka barang dan jasa menurut golongan pendapatan dan golongan wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Pengeluaran Rumah Tangga Atas Aneka Barang Dan Jasa Menurut Golongan Pendapatan dan Golongan Wilayah

	Miskin	Menengah	Kaya
Kota	594,200	4,064,000	78,924,000
Dataran	993,600	3,848,000	56,020,000
Pesisir Pantai	515,200	3,272,000	14,757,600
Pesisir Danau	709,000	1,608,000	50,724,600
Rata-Rata	703,000	3,198,000	50,106,550

Data olah, 2016

Pengeluaran kelompok miskin secara rata-rata untuk aneka barang dan jasa sangat jauh di bawah rata-rata pengeluaran atas aneka barang dan jasa kelompok kaya dalam setahun, dimana pengeluaran kelompok miskin hanya pada kisaran maksimum satu juta dalam setahun sementara kelompok kaya memiliki rata-rata puluhan juta (Rp 50,106,550). Pengeluaran kelompok miskin atas aneka barang dan jasa pada semua wilayah, tidak memiliki perbedaan yang berarti, sementara pengeluaran kelompok menengah atas barang dan jasa, ditemukan kelompok wilayah pesisir danau memiliki jumlah pengeluaran yang berbeda dengan tiga kelompok wilayah lainnya. Demikian

juga dengan pengeluaran kelompok kaya yang diperlihatkan Tabel 5.3 dimana kelompok pendapatan kaya di wilayah pesisir pantai memiliki pengeluaran atas aneka barang dan jasa terbilang kecil jika dibandingkan dengan kelompok wilayah lainnya berkisar 3 sampai 5 kali lebih kecil.

b.3 Pengeluaran Pakaian dan barang tahan lama

Pengeluaran untuk pakaian dan barang tahan lama adalah besarnya pendapatan yang dialokasikan untuk kebutuhan pakaian dan barang-barang tahan lama yang menunjang rumah tangga.

Tabel 4 Pengeluaran Rata-Rata Untuk Pakaian Dan Barang Tahan Lama

	Miskin	Menengah	Kaya
Kota	103,000	2,270,000	2,690,000
Dataran	37,000	1,520,000	8,690,000
Pesisir Pantai	150,000	950,000	2,110,000
Pesisir Danau	10,000	770,000	11,440,000
Rata-Rata	75,000	1,377,500	6,232,500

Data Diolah

Pengeluaran untuk pakaian dan barang tahan lama memiliki perbedaan cukup besar secara rata-rata bagi ketiga golongan pendapatan, namun pada dasarnya pengeluaran jenis ini untuk golongan menengah dan kaya, khususnya di kota tidak memiliki perbedaan yang berarti kecuali di tiga wilayah lainnya (pertanian, pesisir

pantai dan pesisir danau) karena di daerah ini terdapat 2 golongan yaitu golongan pekerja dan golongan pemilik modal, di golongan pemilik modal sering membeli barang investasi seperti untuk di wilayah pertanian, pemilik modal (tuan tanah) membeli mesin-mesin produksi dan pengolahan hasil tani, dan di wilayah pesisir pantai dan pesisir

danau membeli perahu dan alat atangkap.

b.4 Pengeluaran Pajak, Pungutan dan Asuransi

Pengeluaran pajak/pungutan dan asuransi merupakan jenis pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga yang bersifat wajib dan dipungut oleh negara/daerah dan untuk jaminan atas resiko akan datang.

Tabel 5 Pengeluaran Rata-Rata Untuk Pajak, Pungutan dan Asuransi

	Miskin	Menengah	Kaya
Kota	96,000	690,000	3,237,200
Dataran	104,000	2,874,000	3,077,200
Pesisir Pantai	232,000	1,954,000	4,216,000
Pesisir Danau	32,000	1,664,800	4,140,000
Rata-Rata	116,000	1,795,700	3,667,600

Data diolah, 2016

Tabel 4 memperlihatkan jenis pengeluaran untuk pajak/pungutan dan asuransi oleh rumah tangga pada tiga kelompok pendapatan dan empat kelompok wilayah, yang kemudian memperlihatkan adanya perbedaan yang tinggi pengeluaran pada tiga kelompok pendapatan. Namun jika dilihat menurut wilayah pada kelompok pendapatan kaya nampak bahwa memiliki perbedaan yang tidak begitu besar, dan terlihat bahwa pada wilayah pesisir pantai baik kelompok kaya dan dan miskin memiliki pengeluaran yang tertinggi. Hal ini dapat saja terjadi karena adanya pajak/pungutan yang dibebankan kepada petani rumput laut atas lahan/area penanaman rumput laut yang dibudidayakan.

c. Indeks Gini

Pengukuran indeks gini ini dilakukan untuk mengetahui seberapa

besar ketimpangan pendapatan dalam satu wilayah/daerah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya informasi indeks gini dalam satu wilayah, pembuat kebijakan dapat segera membuat kebijakan untuk mengatasi hal tersebut karena akan banyak eksekusi yang timbul sebagai akibat dari ketimpangan yang timbul, khususnya pada ketimpangan yang tinggi.

Dalam kajian ini, wilayah kota diwakili oleh Kecamatan Tempe, wilayah dataran/pertanian diwakili oleh Kecamatan Sabbangparu, wilayah Pesisir Pantai diwakili oleh Kecamatan Bola, wilayah Pesisir danau diwakili oleh Kecamatan Tanahsitolo.

- Indeks Gini Wilayah Perkotaan
Wilayah perkotaan dalam hal ini adalah Kecamatan Tempe memiliki penduduk pada Tahun 2015 sebesar 63,114 jiwa.

Tabel 6 Perhitungan Indeks Gini Wilayah Perkotaan Di Kabupaten Wajo

Pendapatan	Kumulatif Penduduk (X _k)	Kumulatif Pengeluaran (Y _k)	X _k - X _{k-1}	Y _k - Y _{k-1}	(X _k -X _{k-1}) / (Y _k -Y _{k-1})
< 1.000.000	0.3333	0.0364	0.3333	0.0364	0.0121
1.000.000-5.000.000	0.6667	0.1119	0.3333	0.1483	0.0494
5.000.000-10.000.000	0.8667	0.3405	0.2000	0.4524	0.0905
> 10.000.000	1.0000	1.0000	0.1333	1.3405	0.1787
					0.3308
					G₁= 0.67

Hasil perhitungan Indeks Gini di wilayah perkotaan menunjukkan nilai ketimpangan sebesar 0,67, atau dapat dikatakan bahwa terjadi ketimpangan yang tinggi ($G_1 > 0,5$)

- Indeks Gini Wilayah Dataran/Pertanian

Wlayah dataran/ pertanian diwakili oleh Kecamatan Sabbangparu dengan jumlah penduduk 26.613 jiwa

Tabel 7 Perhitungan Indeks Gini Wilayah Pertanian Di Kabupaten Wajo

Pendapatan	Kumulatif Penduduk (X_k)	Kumulatif Pengeluaran (Y_k)	$X_k - X_{k-1}$	$Y_k - Y_{k-1}$	$(X_k - X_{k-1}) / (Y_k - Y_{k-1})$
< 1.000.000	0.3333	0.0352	0.3333	0.0352	0.0117
1.000.000 - 5.000.000	0.8000	0.2369	0.4667	0.2720	0.1269
5.000.000 - 10.000.000	0.8667	0.5304	0.0667	0.7672	0.0511
> 10.000.000	1.0000	1.0000	0.1333	1.5304	0.2041
					0.3939
					G1= 0.61

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa wilayah pertanian di Kabupaten Wajo, memiliki masyarakat dengan pendapatan dengan tingkat ketimpangan yang tinggi namun masih dibawah ketimpangan di daerah perkotaan, hal terlihat dari indeks Gini sebesar 0,61. meskipun pada wilayah ini sangat kental hubungan bawahan dan majikan, di mana majikan (pemilik modal) adalah pemilik lahan, dan bawahan adalah

buruh tani, dan pekerja musiman sehingga melahirkan ketimpangan yang tinggi, namun tetap dalam hubungan kekeluargaan, sehingga ketimpangan di wilayah ini masih di bawah wilayah kota.

- Indeks Gini Wilayah Pesisir Pantai
Wilayah pesisir pantai Kabupaten Wajo, dalam penelitian ini diwakili oleh Kecamatan Bola, dengan jumlah penduduk 20.288 jiwa.

Tabel 8 Perhitungan Indeks Gini Wilayah Pesisir Pantai Di Kabupaten Wajo, 2016

Pendapatan	Kumulatif Penduduk (X_k)	Kumulatif Pengeluaran (Y_k)	$X_k - X_{k-1}$	$Y_k - Y_{k-1}$	$(X_k - X_{k-1}) / (Y_k - Y_{k-1})$
< 1.000.000	0.3333	0.0476	0.3333	0.0476	0.0159
1.000.000 - 2.500.000	0.7333	0.1337	0.4000	0.1813	0.0725
2.500.000 - 4.000.000	0.8000	0.3452	0.0667	0.4789	0.0319
> 4.000.000	1.0000	1.0000	0.2000	1.3452	0.2690
					0.3894
					G1= 0.61

Wilayah pesisir pantai yang diwakili oleh Kecamatan Bola memiliki indeks gini 0,61 yang menunjukkan bahwa wlayah ini memiliki masyarakat dengan tingkat pendapatan dengan ketimpangan yang tinggi. Kondisi ini terjadi karena masyarakat dengan pendapatan rendah tidak memiliki tanah

garapan dan sepenuhnya tergantung pada kondisi laut serta tidak memiliki kapal ikan yang memadai sehingga dalam keseharian hanya bertindak sebagai pekeja dalam sebuah kapal ikan (sawi) yang dimiliki oleh juragan kapal.

- Indeks Gini Wilayah Pesisir Danau

Wilayah pesisir danau Kabupaten Wajo di wakili oleh Kecamatan Tanah Sitolo meskipun, Kecamatan Tempe juga merupakan wilayah pesisir Danau Tempe, namun dalam hal ini dipilih Kecamatan Tanah

Sitolo karena dikhawatirkan terjadi kesulitan saat membedakan wilayah kota dan wilayah pesisir danau. Kecamatan Tanah sitolo memiliki penduduk seanyak 41.014 jiwa.

Tabel 9 Perhitungan Indeks Gini Wilayah Pesisir Danau Di Kabupaten Wajo, 2016

Pendapatan	Kumulatif Penduduk (X_k)	Kumulatif Pengeluaran (Y_k)	$X_k - X_{k-1}$	$Y_k - Y_{k-1}$	$(X_k - X_{k-1}) / (Y_k - Y_{k-1})$
< 1.000.000	0.4000	0.0275	0.4000	0.0275	0.0110
1.000.000 - 5.000.000	0.7333	0.1051	0.3333	0.1326	0.0442
5.000.000 - 10.000.000	0.8667	0.4607	0.1333	0.5657	0.0754
> 10.000.000	1.0000	1.0000	0.1333	1.4607	0.1948
					0.3254
					G1= 0.67

Tabel 9 memperlihatkan bahwa indeks gini wilayah pesisir danau sebesar 0,67 menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki masyarakat dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi, hal ini dapat dilihat Tabel 5.3 dan 5.5 pada pengeluaran kebutuhan aneka barang dan jasa serta pakaian dan barang tahan lama menunjukkan perbedaan yang sangat tinggi antara kelompok miskin dan kelompok kaya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat beberapa alternatif formulasi strategi yang dapat direkomendasikan dalam mencapai sasaran mengurangi tingkat dan penyebab ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wajo. Beberapa hasil tersebut antara lain :

1. Peningkatan Daya Saing Daerah
2. Program Pengembangan Fisik/Lokalitas
3. Program Pengembangan Produk Unggulan
4. Strategi Pertumbuhan Ekonomi
5. Peningkatan Pertumbuhan Konsumsi
6. Peningkatan Investasi
7. Peningkatan Produk Berorientasi Ekspor

8. Peningkatan Produktivitas.
9. Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
10. Peningkatan Kesempatan Kerja
11. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
12. Program Pemberdayaan
13. Pengembangan Kapasitas Daerah.

P E N U T U P

Simpulan

1. Ketimpangan di Kabupaten Wajo secara umum masih tinggi, dimana jika dilihat dari letak geografisnya menghasilkan ketimpangan antar kelompok masyarakat. Wilayah perkotaan dan pesisir danau memiliki ketimpangan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi (0,67) jika dibandingkan dengan wilayah pertanian dan pesisir pantai (0,61).
2. Perbedaan pendapatan yang tinggi pada umumnya disebabkan oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, serta pengeluaran aneka barang dan jasa, serta konsumsi barang tahan lama, sementara pada pengeluaran makanan secara umum dapat

dikatakan memiliki perbedaan yang tidak terlalu tinggi.

Saran

Saran -saran dalam penelitian ini, antara lain

1. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan pemerintah melakukan program subsidi energi listrik dan lainnya.
2. Karena ongkos transportasi cukup tinggi maka perlu ada upaya untuk menekan ongkos transportasi tersebut.
3. Perlu kajian lanjutan yang lebih mendalam dengan memperluas responden dan kawasan kajian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia, 2007, Mengurangi Kemiskinan, [Indonesian Expanding Horizons](#), Jakarta.
- Bappeda Kab. Wajo, 2013, Kabupaten Wajo Angka, BPS Kab. Wajo
- Bappeda Kab. Wajo, 2014, Kabupaten Wajo Angka, BPS Kab. Wajo.
- Bappeda Kab. Wajo, 2015, Kabupaten Wajo Angka, BPS Kab. Wajo
- Bappeda Prov. SulSel, 2015, Sulsel Dalam Angka, BPS Sulawesi Selatan
- Brahmbatt, Milan, 2006, Kemiskinan di Indonesia Belum Terentaskan, [Republika Online](#), Jakarta.
- Brannen, Julia, 1999, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Fakultas Tarbiyah

IAIN Antasari Samarinda dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dewanta, Awan Setya, (Ed), 1995, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia ICMI Orwil DIY, Yogyakarta.

Erani, Yustika Ahmad., 2003, Negara Versus Kaum Miskin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fox Piven, Frances, dan A. Cloward Richard, 1993, *Regulating The Poor : The Function of Public Walfer*, Vintage Books.

<http://web.worldbank.org/>, 2007, Kemiskinan, Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

Jhingan, M.L, 2007, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Kartasasmita, Ginandjar, 1995, Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES, Jakarta.

Koentjaraningrat, 2004, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajat, 2000, Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YPKN, Yogyakarta.

Eduard Depari dan Colin Mc Andrew, eds

*) *Penulis adalah Dosen PPS Magister Manajemen STIM LPI Makassar*